

**VILLAGE HEAD OF PERFORMANCE EVALUATION IN DEVELOPMENT
IMPLEMENTATION VILLAGE (Studies In the village of Upper Subdistrict
Ranoketang Touluan Southeast Minahasa Regency)**

**CHRISTINE TAMPONGANGOY
J.H. POSUMAH
VERY. Y. LONDA**

ABSTRACT : *The success or failure Increased development in the village is very much determined by the village head, the extent to which the head of the village to plan, mobilize, motivate, direct, communication, organizing, implementing, in relation to the management means for providing leadership management function or as a manager in a management , In connection with the process of rural development, in the process of rural development consists of two main elements, namely and development that the community and the government. The village head in this very important role in the development of the village where the village head who are leaders in the village as well as the discount formal duties and obligations in carrying out the task of managing the construction of PP 72 Th, 2005.*

During the development program plan drawn / assigned for this in accordance with the aspirations of the local community needs, and development programs undertaken by the government during the year, namely the collection / procurement material construction of the village office, casting shoulders village road through the village fund, improving the economy of the community, with encourage people to maximize the potential of rice paddies and fields, through the planting of rice 2 times per year, the potential of the lake, encouraging the community to arisan home, who do not have homes, and other forms of financial arisan (guard / hamlet) for coaching and learning to save.

Keywords: *Village Head Performance, Implementation of Rural Development.*

PENDAHULUAN

Keberhasilan atau kegagalan Peningkatan Pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala desa, yang sejauh mana kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen. Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa di mana kepala desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memliktugas dan kewajiban dalam

menyelenggarakan tugas urusan pembangunan PP 72 Th 2005.

Adapun tugas dan fungsi kepala desa dimana kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang ada di desa, yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat, kepala desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas – tugas lain yang di limpahkan kepada desa.

Perubahan zaman yang semakin maju, memberikan dampak yang positif bagi pembangunan suatu desa. Pencapaian pembangunan suatu desa menuntut peran seorang pemimpin yang berkualitas, dengan kata lain untuk mengimbangi tuntutan perubahan kearah yang lebih maju setiap desa harus memiliki figur seorang pemimpin yang

dapat mempengaruhi aparat bawahannya supaya bekerja dengan maksimal sehingga *output* yang dihasilkan bisa lebih baik. Oleh karena itu, ada baiknya setiap Kepala Desa berusaha meningkatkan kualitas gaya kepemimpinannya.

Dalam pelaksanaannya sendiri, pemerintah sebagai pelaksana dari pembangunan harus mempunyai manajemen dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan dari pembangunan itu sendiri.

Dimana pada pelaksanaan pembangunan di desa ranoketang atas ,anggaran yang dikeluarkan desa tersebut dalam pembuatan drainase yaitu Rp. 300.000.000,00, sementara tingkat efektifitasnya selalu dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara yang didapatkan merupakan hasil yang memang direncanakan atau tidak,pada pelaksanaan program pembangunan yang ada didesa ranoketang atas yang sudah terealisasi yaitu pembuatan drainase, dan saluran air pertanian/selokan dan ada juga program pembangunan yang belum terealisasi yaitu kantor desa.

Indikasi permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian, sehingga penelitian ini diberi judul “*Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ranoketang Atas.*”

Konsep Evaluasi

1. Definisi Evaluasi

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

2. Tujuan Evaluasi

Mengukur efek suatu program /kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Mengukur

efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian.

3. Fungsi Evaluasi (William N. Dunn ; Ripley)

Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik, karenanya sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, yakni:

- a. Memberikan Eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/ kebijakan. Untuk itu dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.
- b. Mengukur Kepatuhan, yakni mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan,
- c. Melakukan Auditing untuk melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju? Apakah ada kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, apakah ada penyimpangan tujuan program, dan pada pelaksanaan program,
- d. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak yang tak diharapkan.

4. Dimensi Evaluasi

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi dievaluasi dalam kebijakan publik. Dimensi tersebut adalah :

- a. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan Kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Darinya kita akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifitas dan efisiensi, dsb yang terkait.
- b. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program

dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan).

5. Dimensi Evaluasi Kinerja (William Dunn, 2003:429)
 - a. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
 - c. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
 - d. Kecukupan, seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
 - e. Perataan (equity), William Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
 - f. Responsivitas, seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah

terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Konsep Kinerja

Istilah kinerja sangat populer dan banyak digunakan banyak pihak pada akhir-akhir ini, meskipun sesungguhnya istilah ini bukanlah istilah baru karena sejak lama telah digunakan dalam literatur dibidang manajemen atau literatur dibidang keorganisasian.

Istilah kinerja merupakan alih bahasa atau terjemahan dari istilah bahasa inggris "*performance*". Menurut kamus Inggris-Indonesia (Echols dan Shadily, 2002), istilah *performance* ini diartikan sebagai : pertunjukkan, perbuatan, pelaksanaan atau penyelenggaraan, prestasi atau hasil.

Dalam arti yang sederhana, istilah kinerja banyak diartikan sebagai prestasi kerja. Rue dan Bryas (*dalam* Yousa, 2002) mengartikan kinerja (*performance*) adalah "*the degree of accomplishment*" atau tingkat pencapaian hasil; dengan kata lain menurut Keban (1995), kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan.

Wibowo (2007) mendefinisikan kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Konsep Pembangunan

Istilah pembangunan (*development*) telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep pembangunan seperti pertumbuhan (*growth*), modernisasi (*modernization*), rekonstruksi (*reconstruction*), pembaharuan (*innovation*), perubahan sosial

(*social change*), dan lain-lainnya (Bryant dan White, 1987).

Menurut Michael Todaro (*dalam* Bryant dan White, 1987), pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sistem sosial secara keseluruhan; yaitu disamping peningkatan pendapatan dan output, juga menyangkut perubahan radikal struktur kelembagaan, struktur sosial serta struktur administratif, dan perubahan sikap, adat kebiasaan serta kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan fokus penelitian ini ialah evaluasi kinerja kepala desa dalam pembangunan, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan jenis metode kualitatif.

Moleong (2006) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Nasution, 2001). Berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

Definisi Konsep Fokus Penelitian

Keban (1998) mengatakan bahwa cara pengukuran variabel penelitian biasanya

dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsep dan definisi operasional. Dalam definisi konsep, peneliti berusaha menggambarkan batasan dari variabel yang hendak diteliti.

Sumber Data (Informan)

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan variabel pelaksanaan.

Porposif sampel ini digunakan dalam penentuan jumlah informan penelitian, Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Hukum Tua (1 orang)
- Sekretaris Desa (1 orang)
- Kepala Urusan (1 orang)
- Kepala Jaga (2 orang)
- Pengurus BPD (2 orang)
- Masyarakat (5 orang)

1. Data Sekunder

Yaitu data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan – laporan, dokumen – dokumen, buku teks, baik pada instansi pemerintah serta perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

Pembahasan

a. Kinerja Kepala Desa di Bidang Pembangunan
Sejalan dengan kebutuhan masyarakat, maka sebagai pelayan publik yangmendapat kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus senantiasa mengacu padakepuasan masyarakat yang merupakan hal penting dalam pemberian pelayanan. Dalam usaha pembangunan infrastruktur, pemerintah desa selalu berupayasemaksimal mungkin guna tercapainya tujuan pelayanan tersebut, namun tidakselamanya berjalan sesuai seperti apa yang kita harapkan terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah yang ada mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat.

Hasil akhir atau evaluasi kinerja Kepala Desa akan diukur melalui enam poin penting dalam indikator kinerja kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003:429), yaitu Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan (aquity).

Dengan demikian evaluasi atau penilaian akhir dari kinerja kepala desa dalam pembangunan tersebut akan diuraikan berdasarkan enam poin indikator kinerja kebijakan di atas.

1. Efektifitas secara umum, yaitu menggambarkan sejauhmana hasil yang diinginkan telah dicapai dari suatu kegiatan baik secara fisik (sarana dan Prasarana) ataupun nonfisik (pelatihan) yang diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
2. Efisiensi ,Yaitu menggambarkan berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada umumnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan yang terbaik untuk masyarakat karena itu merupakan proses untuk menuju tujuan tersebut dalam proses pelayanan rutin.
3. Kecukupan , Yaitu menggambarkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dimana yang dimaksud disini yaitu sumber daya manusia yang ada.Sumber daya manusi (SDM) merupaka salah satu factor penunjang terlaksanannya pembangunan yang ada didesa ranoketang atas.Dalam pelaksanaan pembangunan yang ada, pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa turut serta dan bertanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan yang ada di wilayahnya.
4. Perataan,Yaitu menggambarkan biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda. Salah satu informan yaitu bapak Ferry mengatakan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa khususnya Kepala desa dana yang dipakai dalam pembangunan yaitu dana dari pemerintah pusat seperti ADD (Alokasi Dana Desa).Dan menurut bapak kinerja dari kepala desa sudah bagus karena setiap

program pembangunan yang dilaksanakan berguna bagi masyarakat.

5. Responsivitas Yaitu menggambarkan hasil yang dicapai memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu.

Salah satu informan yaitu ibu Yeni mengatakan, selama kepala desa yang sekarang menjabat, kepala desa mendirikan kantor hukum tua, pembangunan drainase dan akses jalan ke kebun juga nanti disaat hukum tua sekarang menjabat baru terlaksana, usaha yang dilakukan oleh bapak kepala desa cukup berhasil karena selama kepala desa sekarang menjabat pembangunan kantor hukum tua, drainase , akses jalan kekebun sudah terbuka,jadi sudah cukup bagus. Dan sejauh ini hasil pencapaian dari beliau sudah bagus menurut masyarakat.

Kesimpulan

Dengan demikian evaluasi atau penilaian akhir dari kinerja kepala desa dalam pembangunan tersebut akan diuraikan berdasarkan enam poin indikator kinerja kebijakan di atas.

1. Efektivitas. Secara umum, yaitu menggambarkan sejauhmana hasil yang diinginkan telah dicapai dari suatu kegiatan baik secara fisik (sarana dan Prasarana) ataupun nonfisik (pelatihan) yang diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
2. Efisiensi, Yaitu menggambarkan berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti yang dikatakan bapak Boy selaku kepala jaga I mengatakan setiap program pembangunan atau kegiatan yang ada didesa selalu dimusyawarakan bersama-sama melalui musrembang desa yang dihadiri oleh semua perangkat desa,dan Lembaga yang ada dan masyarakat juga harus terlibat didalamnya karena partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh. Dan sejauh ini pencapaian hasil dari kinerja kepala desa sudah cukup

bagus dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan.

3. Kecukupan, Yaitu menggambarkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dimana yang dimaksud disini yaitu sumber daya manusia yang ada.
4. Perataan, Yaitu menggambarkan biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda. Salah satu informan yaitu bapak Ferry mengatakan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa khususnya Kepala desa dana yang dipakai dalam pembangunan yaitu dana dari pemerintah pusat seperti ADD (Alokasi Dana Desa). Dan menurut bapak kinerja dari kepala desa sudah bagus karena setiap program pembangunan yang dilaksanakan berguna bagi masyarakat.
5. Responsivitas, Yaitu menggambarkan hasil yang dicapai memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu. Salah satu informan yaitu ibu Yeni mengatakan, selama kepala desa yang sekarang menjabat, kepala desa mendirikan kantor hukum tua, pembangunan drainase dan akses jalan ke kebun juga nanti disaat hukum tua sekarang menjabat baru terlaksana, usaha yang dilakukan oleh bapak kepala desa cukup berhasil karena selama kepala desa sekarang menjabat pembangunan kantor hukum tua, drainase, akses jalan ke kebun sudah terbuka, jadi sudah cukup bagus.
6. Ketepatan, Menggambarkan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai. Setiap aspek dalam usulan program/proyek pembangunan yang ada memang harus dibicarakan bersama agar program pembangunan yang akan dilaksanakan tepat dan terarah sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat desa ranoketang atas.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Efektivitas kepala desa harus terus dipertahankan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada.
2. Efisiensi, tingkatkan terus kinerja kepala desa dan selalu berkomunikasi dengan masyarakat di desa tersebut.
3. Kepala desa harus selalu mendorong dan mengarahkan masyarakat yang, karena peran masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Kepala desa dalam pelaksanaannya juga harus transparan kepada masyarakat dan setiap pendanaan selalu dikoordinasikan bersama pemerintah dan masyarakat.
5. Pertahankan kepercayaan masyarakat yang ada agar masyarakat selalu merasa puas dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tersebut.
6. Kepala desa harus selalu berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah dalam setiap program yang akan dilaksanakan agar program tersebut terlaksana sesuai yang diinginkan dan terarah.

Daftar Pustaka

- Dunn William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan UGM-Press, Yogyakarta.
- Echols J. dan Hasan Shadilly, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, C.S.T (1983). *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Keban, S. 1995. *Analisis Peran dalam Penentuan Alternatif Kebijakan*, Modul, MAP-UGM, Yogyakarta.
- LAN dan BPKP, 2000. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Modul Sosialisasi Sistem AKIP, LAN-RI, Jakarta.

Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*.
Remaja Redos karya, Bandung.

Siagian, S.P. 1994, *Perencanaan
Pembangunan*, Gunung Agung,
Jakarta.

Sugiono, 2009. Metodologi *Penelitian
Administrasi*. Alfabeta, Bandung.